

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu rancangan yang diungkapkan secara sistematis dan berjangka waktu tertentu atau satu periodik dalam satuan uang dapat disebut anggaran. Proses penetapan tugas tiap manajer dalam melaksanakan program dan sasaran merupakan dasar dari penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran tersebut dialokasikan oleh siapa yang mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan dan sumber dana ekonomi yang ditetapkan sesuai dengan dana yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut guna melaksanakan program atau sasaran-sasaran. Penyusunan suatu anggaran pemerintah juga harus di dasarkan pada pemikiran-pemikiran guna mensejahterakan kepentingan masyarakat, bukan dalam penggunaan untuk hal kepentingan pribadi masing-masing orang yang menyusun anggaran pemerintah (Mardiasmo, 2009:61 dalam Paramitha dan Gayatri).

Kejelasan sasaran anggaran adalah susunan anggaran yang dapat dimengerti oleh individu yang bertanggung jawab guna pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara spesifik dan efisien sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam sistem pemerintahan daerah, kejelasan sasaran anggaran merupakan perihal yang sangat diperlukan dan diperhatikan guna mengerti kinerja seperti apa yang dilakukan di lapangan. Apakah jelas sasaran anggaran pembangunan yang terjadi pada pertumbuhan masyarakat atau tidak. Pengelolaan

keuangan yang dilakukan para setiap aparaturnya pemerintah harus memiliki kejelasan program dan sasaran-sasaran agar penyusunan anggaran pada tahun selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada organisasi pemerintah.

Guna meyakinkan anggaran yang sudah disusun dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan program dan sasaran, maka perlu menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi mengaplikasikan pada informasi-informasi akuntansi. Semua tata cara dan teknik formal yang dilaksanakan dengan memanfaatkan informasi guna mengevaluasi sistem aktivitas organisasi disebut sistem pengendalian akuntansi (Kusumaningrum, 2010). Dalam prosedur pengontrolan, sistem pelaporan, dan sistem perencanaan yang didasarkan pada informasi akuntansi merupakan hal yang termasuk dalam pengendalian akuntansi.

Untuk pemantauan yang mengarahkan kinerja instansi pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah disusun maka perlu adanya sistem pelaporan yang baik. Kewajiban untuk melaporkan informasi, data *financial*, dan informasi lainnya yang dilakukan pemerintah guna pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (Martin, 1994 dalam Dharma, 2004). Elemen yang penting dan berguna untuk seluruh cakupan teknis pengendalian, yang dibutuhkan guna mendorong, memperkirakan, dan memberi hukuman pada kinerja individu dari suatu instansi pemerintah adalah sistem pengendalian. Prasyarat bagi kinerja yang lebih baik adalah sistem pengendalian yang berhasil (Miah dan Goyal, 1990 dalam Dharma, 2004).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja, seharusnya pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi untuk memaksimalkan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah serangkaian yang sistematis dari beberapa aktivitas, alat, dan prosedur yang dipertimbangkan dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Wujud dari pelaksanaan pertanggung jawaban dari instansi pemerintah atau seseorang yang bernaung di pemerintah guna pengelolaan sumber daya yang telah dirancang untuk pencapaian tujuan, yang dilaporkan melalui laporan akuntabilitas kinerja secara tahunan adalah pengertian dari akuntabilitas kinerja (Hidayatullah, dkk, 2105). Masyarakat mampu menilai melalui adanya laporan akuntabilitas. Sejauh mana pencapaian tujuan yang ditetapkan telah dicapai, dan sejauh mana pengelolaan sumber daya yang dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan sistem akuntabilitas wajib diterapkan oleh instansi pemerintah dan pelaporannya disampaikan oleh instansi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan laporan akuntabilitas yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah dalam melakukan kewajiban dan menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baik disebabkan oleh sebagian aspek yang memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang mekanisme pertanggung jawaban serta

pengawasan keuangan daerah melalui audit intern. Menurut Ary (2015) penerapan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam program dan sasaran kerja yang disesuaikan dengan rakyat sebagai pedoman pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien.

Untuk mengukur tindakan-tindakan apa yang dilaksanakan untuk memaksimalkan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan suatu rencana atau waktu merealisasikan suatu anggaran diperlukan laporan umpan balik, sehingga pemerintah dan masyarakat mengerti output dari perwujudan *planning* atau pencapaian sasaran anggaran yang telah disusun. Dalam hal ini, instansi pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penggunaan sistem akuntabilitas kinerja, yang disampaikan laporannya oleh instansi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Pejabat yang bertanggung jawab dalam pembuatan LAKIP adalah pegawai yang secara struktur organisasi mempunyai tanggung jawab mengendalikan fungsi administrasi di instansi masing-masing. Kemudian pimpinan atau ketua instansi bersama staff kerja harus mampu mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Kasus yang terjadi yaitu Anggaran Proyek Pengadaan Taman, Biaya Perjalanan Dinas, Pengadaan Konstruksi Jalan, dan Proyek Pembelian Pagar untuk kebun pertanian pada Dinas Pertanian. Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang diduga banyak yang terindikasikan fiktif. LSM LKPK (Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen) APBD perubahan tahun 2017 pada

Kantor Dinas Pertanian Kota Semarang menemukan kejangalan ketika tidak adanya konfirmasi dari Sekretaris Dinas Pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut pihaknya akan mengambil langkah untuk mengadukan hal ini kepada aparat penegak hukum. Munculnya kasus tersebut menimbulkan kerugian yang mengakibatkan terungkapnya Akuntabilitas belum diterapkan sepenuhnya. Hal ini juga membuktikan bahwa kurangnya kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi serta sistem pelaporan dalam menyajikan informasi bagi masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang dapat merugikan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan primayoni, dkk (2014) membuktikan kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk memudahkan aparat guna mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau tugas organisasi guna mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah disusun sebelumnya, maka perlu adanya sasaran anggaran yang jelas. Sasaran anggaran yang tidak jelas mampu menciptakan ketidakpastian atau keragu-raguan para pelaksana. Hal ini terdapat persamaan yang dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2105), Setiawan (2013), Wahyuni, dkk (2013), dan Hidayatullah, dkk (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015), setiawan (2013), Hidayatullah, dkk (2015) membuktikan bahwa pengendalian

akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Manajemen organisasi dalam melaksanakan proses dengan menggunakan pengendalian akuntansi, berharap dapat menanggung hasil yang memuaskan berupa kinerja yang sesungguhnya dan memutuskan tindakan apa yang dibutuhkan ketika kinerja yang dilaksanakan memiliki perbedaan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan sumber daya yang ada dimanfaatkan secara efisien, efektif dan ekonomis. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2013) berbeda, dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apabila anggaran yang direncanakan secara jelas dengan sumber daya yang ada tidak mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien yang berpotensi menyebabkan kecurangan dan penyimpangan anggaran. Maka, pengendalian akuntansi yang dilakukan semakin besar sehingga semakin kecil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2013) membuktikan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya kondisi dimana pemerintah daerah belum mengoptimalkan dalam sistem pelaporan yang ada untuk mengembangkan akuntabilitas kerjanya menjadi hal yang lebih baik lagi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015), Hidayatullah, dkk (2015), serta Wahyuni, dkk (2013), menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel tercipta dari adanya sistem pelaporan,

dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang di ambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif demi meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Terdapat ketidak konsistenan penelitian maka layak untuk diteliti, penelitian ini mereplikasi dari Cahyani dan Utama (2015). Perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah menghapus variabel moderasi yaitu komitmen organisasi karena tidak ada pengaruh moderasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sampel penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemerintah Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Guna mempermudah pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan dalam realisasi tugas instansi maka perlu adanya kejelasan sasaran anggaran. Dan dengan diterapkannya pengendalian akuntansi sehingga proses yang dilaksanakan oleh manajemen instansi menanggung pemakaian sumber daya dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sistem pelaporan yang efektif tercermin dari sistem pengelolaan keuangan yang terdiri dari sistem pelaporan, yang mana menjelaskan tentang mengapa terjadinya penyimpangan, apa yang harus dilaksanakan atau tindakan yang harus di ambil untuk mengevaluasi, penyimpangan yang tidak menguntungkan, dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
2. Apakah pengaruh efektivitas pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
3. Apakah pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan serta pemahaman mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, efektivitas

pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi kantor pemerintah yang diteliti, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja karyawan untuk menjadi lebih baik.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah referensi untuk bahan pertimbangan dan acuan dalam penelitian selanjutnya.